



POLITEIA: Jurnal Ilmu Politik

Journal homepage: <https://talenta.usu.ac.id/politeia>



Membangun Narasi Politik melalui Humor dan Troll: Studi Kasus Akun Instagram Kementerian Kegelapan

Muhammad Miftah Taufik Setiawan^{*1}, Wasyihatul Akmal², Zachraini Sulaiman Nuur³

¹²³Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Jakarta Selatan, 12450, Indonesia

*Corresponding Author: 2410413089@mahasiswa.upnvj.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received 06 Oktober 2026

Revised 26 Juni 2026

Accepted 07 July 2026

Available online 31 July 2026

E-ISSN: 0216-9290

How to cite:

Setiawan, M. M. T., Akmal, W., & Nuur, Z. (2025). Membangun narasi politik melalui humor dan troll: Studi kasus akun Instagram Kementerian Kegelapan. POLITEIA: Jurnal Ilmu Politik. 18 (2), 122-127.

ABSTRACT

This study discusses how the Instagram account @kementeriankegelapan builds political narratives through humor and trolling as a form of alternative political participation in Indonesia's digital space. In the context of the rise of internet-based political culture, humor and trolling are understood not merely as entertainment, but as symbolic communication strategies that reflect both resistance and domination of mainstream political discourse. This study uses a qualitative approach with a case study method and is based on the theory of trolling by Whitney Phillips and Ryan M. Milner. The results show that the practice of humor and trolling on this account is ambivalent: it functions as a mechanism for criticizing authority, but also as a new style of communication that strengthens the account's position in framing public opinion. Through irony, parody, and bureaucratic absurdity, these accounts disrupt the legitimacy of political symbols while creating an inclusive space for political expression for the younger generation. In addition, active audience participation shows that digital humor plays an important role in forming collaborative political communities on social media. This study concludes that humor and trolling are effective instruments in articulating alternative political narratives in the social media era, marking a shift in the form of political participation from the formal realm to creative and reflective cultural expression.

Keyword: Political Humor, Trolling, Digital Political Communication, Social Media, Political Participation

ABSTRAK

Penelitian ini membahas bagaimana akun Instagram @kementeriankegelapan membangun narasi politik melalui humor dan troll sebagai bentuk partisipasi politik alternatif di ruang digital Indonesia. Dalam konteks meningkatnya budaya politik berbasis internet, humor dan troll dipahami bukan sekadar hiburan, melainkan strategi komunikasi simbolik yang mencerminkan resistensi sekaligus dominasi terhadap wacana politik arus utama. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus serta berlandaskan teori trolling dari Whitney Phillips dan Ryan M. Milner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik humor dan troll pada akun tersebut bersifat ambivalen: berfungsi sebagai mekanisme kritik terhadap otoritas, namun juga sebagai gaya komunikasi baru yang memperkuat posisi akun dalam membingkai opini publik. Melalui ironi, parodi, dan absurditas birokratis, akun ini mengganggu legitimasi simbol politik sekaligus menciptakan ruang ekspresi politik yang inklusif bagi generasi muda. Selain itu, partisipasi audiens yang aktif menunjukkan bahwa humor digital berperan penting dalam membentuk komunitas politik kolaboratif di media sosial. Penelitian ini menyimpulkan bahwa humor dan troll merupakan instrumen efektif dalam mengartikulasikan narasi politik alternatif di era media sosial, yang menandai pergeseran bentuk partisipasi politik dari ranah formal menuju ekspresi kultural yang kreatif dan reflektif.

Kata Kunci: humor politik, troll, komunikasi politik digital, media sosial, partisipasi politik



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International.

<https://doi.org/10.32734/politeia.v18i02.23015>

1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi komunikasi digital telah mengubah lanskap politik di Indonesia. Media sosial saat ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat untuk bersosialisasi, tetapi juga sebagai arena baru untuk partisipasi politik warga negara. Melalui platform seperti Instagram, Twitter, dan TikTok, masyarakat dapat mengekspresikan pendapat, mengkritik kebijakan, serta membentuk wacana politik dengan bebas. Perkembangan media sosial yang semakin masif berperan dan berdampak besar terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam ruang politik dan publik. Menurut Munzir, Asmawi, dan Zetra (2019), media sosial memiliki peranan yang signifikan dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat melalui komunikasi dua arah serta ruang publik digital.

Namun, partisipasi politik di media sosial tidak selalu muncul dalam bentuk yang formal atau serius. Dalam konteks masyarakat yang sudah jenuh dengan gaya komunikasi politik yang kaku dan elitis, muncul bentuk baru dari ekspresi politik warga, yaitu melalui humor, satir, dan troll. Fenomena ini mencerminkan adanya pergeseran dari politik konvensional menuju gaya politik baru (*new political style*) yang lebih selaras dengan budaya internet dan selera generasi muda. Humor digunakan sebagai sarana untuk mengkritik kekuasaan dengan cara yang halus, sementara troll berfungsi sebagai strategi simbolik untuk mengungkapkan absurditas politik dan birokrasi.

Dalam hal ini, akun satir seperti @kementeriankegelapan dapat dipahami sebagai bentuk partisipasi politik alternatif, yang memanfaatkan humor dan troll sebagai alat untuk menyampaikan kritik terhadap kekuasaan di dunia maya. Melalui "pengumuman resmi" palsu dan parodi terhadap bahasa birokrasi, akun ini berhasil menciptakan narasi politik yang tidak hanya kritis tetapi juga menghibur. Humor yang terdapat dalam akun ini berfungsi sebagai sarana untuk mengekspresikan resistensi politik di dunia digital, di mana kritik terhadap kekuasaan disampaikan dengan cara yang kreatif dan mudah dipahami oleh audiens yang lebih luas, terutama generasi muda.

Dalam konteks ini, analisis terhadap akun instagram @kementeriankegelapan menjadi sangat penting. Akun ini tidak hanya mencerminkan praktik komunikasi politik alternatif, tetapi juga mencerminkan cara warga memanfaatkan budaya digital untuk berpartisipasi dalam wacana publik. Dengan menggunakan humor dan troll, akun tersebut menunjukkan dimensi baru dari politik digital yang tidak selalu serius, namun tetap kaya akan makna dan pengaruh.

2. Kajian Literatur

Nurul Hasfi (2019) menjelaskan bahwa kehadiran media digital membawa perubahan besar dalam cara manusia berkomunikasi tentang politik. Jika dulu pesan politik hanya datang dari atas, yakni dari para elite melalui media konvensional. Akan tetapi kini masyarakat bisa ikut berbicara, menanggapi, bahkan menciptakan makna politiknya sendiri. Dunia digital membuka ruang baru yang lebih bebas, spontan, dan kreatif. Hasfi menekankan bahwa sifat media digital yang murah, cepat, dan terbuka memungkinkan lahirnya berbagai bentuk ekspresi politik baru. Humor, parodi, hingga troll menjadi cara warga menyalurkan kritik tanpa harus berdebat secara keras. Tawa dan sindiran menjadi bahasa politik yang akrab di dunia maya.

Dalam konteks itu, akun satir seperti Kementerian Kegelapan menjadi contoh nyata bagaimana humor digunakan untuk membangun narasi politik alternatif. Dengan gaya jenaka dan sarkastik, akun ini mengajak publik menertawakan, sekaligus memikirkan, realitas politik yang sering terasa absurd. Bagi Hasfi, komunikasi politik digital memang membawa dua sisi: membuka peluang partisipasi, tapi juga risiko misinformasi. Namun pada akhirnya, ruang digital tetap memberi masyarakat cara baru untuk menyampaikan suara dan membangun kesadaran politik dengan caranya sendiri, seperti melalui kreativitas dan tawa.

Meskipun demikian, analisis Hasfi tetap terfokus pada dinamika umum komunikasi politik digital, seperti partisipasi, disinformasi, dan interaksi antara elite dan publik. Hingga saat ini, masih

sedikit kajian yang menyoroti bagaimana elemen budaya populer, seperti humor dan troll, membentuk narasi politik di media sosial. Di sinilah terletak celah penelitian ini: memahami humor bukan hanya sebagai hiburan, tetapi juga sebagai strategi komunikasi politik dan bentuk partisipasi digital masyarakat. Melalui studi kasus akun Kementerian Kegelapan, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis bagaimana humor dan ironi digunakan untuk membangun wacana politik alternatif di ruang digital Indonesia.

Pandangan ini sejalan dengan temuan Anang Sujoko (2019) dalam penelitiannya yang berjudul “Satirical Political Communication in the 2019 Indonesia’s Presidential Election on Social Media.” Melalui pendekatan Analisis Wacana Kritis (CDA), Sujoko menyelidiki bagaimana akun-akun satir seperti @nurhadi_aldo, @skinnyindonesia24, dan gerakan #2019GantiPresiden memanfaatkan humor dan parodi untuk menyampaikan kritik terhadap kandidat serta dinamika politik selama Pilpres 2019. Ia menemukan bahwa satire memiliki fungsi ganda: sebagai bentuk perlawanan terhadap kekuasaan, sekaligus sebagai alat dominasi simbolik yang dapat membingkai realitas politik dengan cara tertentu. Dalam konteks ini, satire tidak hanya berperan sebagai hiburan (politik hiburan), tetapi juga sebagai strategi komunikasi politik yang mampu mempengaruhi persepsi dan opini publik melalui penyebaran viral di media sosial.

Namun, baik Hasfi maupun Sujoko menunjukkan adanya batasan dalam penelitian mereka. Hasfi lebih menekankan aspek umum dari partisipasi digital dan dinamika disinformasi, sementara Sujoko berfokus pada konteks politik elektoral selama Pilpres 2019. Keduanya belum secara mendalam mengeksplorasi bagaimana elemen budaya populer seperti humor, troll, dan satire politik digunakan secara berkelanjutan di luar momen pemilu untuk membangun wacana sosial-politik. Di sinilah terletak celah penelitian (research gap) yang berusaha dijawab oleh studi ini.

Penelitian mengenai akun @kementeriankegelapan memberikan perluasan konteks dengan menempatkan humor dan troll sebagai strategi komunikasi politik yang beroperasi di ranah kultural, bukan hanya elektoral. Akun ini menggunakan gaya visual formal dan bahasa birokratis-parodis untuk menyampaikan kritik sosial yang tajam namun menggelikan, membentuk narasi politik alternatif yang resonan di kalangan pengguna muda media sosial. Dengan demikian, studi ini tidak hanya melanjutkan arah penelitian Hasfi dan Sujoko, tetapi juga memperkaya pemahaman tentang bagaimana humor digital berperan dalam membangun opini publik dan resistensi simbolik di ruang politik Indonesia kontemporer.

3. Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, penulis menggunakan metode ini karena memungkinkan untuk menganalisis dan memahami pola-pola perilaku dan simbol-simbol dalam interaksi sosial (Jacob dalam Raco, 2010). Adapun data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan, di mana penulis mencari data melalui sumber seperti buku, artikel, dan dokumen-dokumen lainnya yang relevan dengan penelitian yang dilakukan.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Humor dan Troll sebagai Alat Dominasi atau Resistensi

Analisis konten akun @kementeriankegelapan menunjukkan bahwa humor dan troll berfungsi sebagai praktik digital subculture yang khas, sejalan dengan kerangka Whitney Phillips dan Ryan Milner (2017) mengenai ambivalent internet. Phillips & Milner menekankan bahwa trolling tidak hanya sekadar keisengan, tetapi praktik komunikasi yang sarat ambivalensi: di satu sisi merupakan playful mischief, namun di sisi lain dapat menjadi bentuk antagonisme yang menyingkap kontradiksi wacana dominan. Dalam konteks ini, unggahan akun Kementerian Kegelapan memperlihatkan bagaimana troll bekerja sebagai alat resistensi sekaligus dominasi dalam ruang politik digital. Pertama, trolling hadir dalam bentuk distorsi simbolik. Konten berupa plesetan nama tokoh politik seperti “Aniesini Gusini

atau Fufubaba Fufufini” atau permainan kata “Hap hap hap KUHAP” merupakan strategi khas troll yang mengubah tanda-tanda resmi menjadi lelucon absurd. Phillips & Milner (2017) menegaskan bahwa ironi dan absurditas merupakan inti dari praktik trolling yang bersifat ambivalen—di mana simbol arus utama dipelintir menjadi bahan tertawaan, namun tetap melekat pada struktur makna politik yang dikritiknya. Dengan demikian, troll berfungsi sebagai bentuk culture jamming yang mengacaukan keteraturan wacana resmi sekaligus memperlihatkan kerentanan legitimasi simbol negara. Kedua, troll digunakan sebagai alat resistensi dan dominasi wacana digital. Misalnya, unggahan ucapan ulang tahun tokoh politik yang dibalut kalimat formal seperti “Selamat ulang tahun... semoga Tuhan yang membalasi,” di permukaan tampak netral, tetapi menyiratkan kritik terhadap figur yang dituju. Phillips & Milner (2017) menjelaskan fenomena ini sebagai ironic ambiguity: pesan yang sengaja dibuat multitafsir, sehingga makna hanya dapat ditangkap oleh audiens yang berbagi pengetahuan politik tertentu. Strategi ini membentuk inside joke politik yang mempererat komunitas digital kritis sekaligus menegaskan posisi akun sebagai penggiring wacana alternatif di ruang publik online. Ketiga, troll tampil dalam satire politik visual, seperti ilustrasi pejabat dalam bentuk karikatur absurd atau parodi lambang negara. Phillips & Milner (2017) menyoroti peran visual mischief dalam budaya digital, yakni memanfaatkan humor visual untuk mengganggu dan merusak kesakralan simbol dominan. Praktik ini mengafirmasi pandangan bahwa troll dapat membongkar otoritas simbolik dengan cara “membajak” representasi resmi negara. Hal ini sejalan dengan temuan Sujoko (2020) bahwa humor satiris di media sosial menjadi medium aman untuk mengkritik kekuasaan tanpa melanggar batas sosial dan politik. Dengan demikian, humor troll dalam akun Kementerian Kegelapan bersifat ambivalen: ia sekaligus menjadi mekanisme resistensi simbolik terhadap otoritas dan sarana dominasi dalam memonopoli gaya komunikasi politik digital melalui ironi.

4.2 Bentuk Satire Politik dan Pembentukan Opini Publik

Bentuk satire politik dalam konten akun ini memperlihatkan bagaimana troll tidak hanya menimbulkan tawa, tetapi juga mengarahkan opini publik. Muntaha dan Arianto (2024) menunjukkan bahwa ironi merupakan bentuk satire dominan di media sosial, karena memungkinkan audiens menangkap pesan tersirat melalui konteks. Strategi ini terlihat jelas pada unggahan Kementerian Kegelapan yang penuh permainan kata dan ironi politik. Phillips & Milner (2017) menekankan bahwa praktik trolling dan humor digital selalu bersifat ambivalen: ia bisa dipahami sebagai hiburan ringan, tetapi sekaligus berfungsi politis dengan menantang narasi resmi. Konten Kementerian Kegelapan merepresentasikan ambivalensi ini: satu sisi terlihat sebagai candaan, di sisi lain menjadi kanal penyebaran kritik politik yang efektif. Seperti dicatat Pentzold et al. (2022), meme politik dan parodi digital adalah tindakan politik yang bekerja dengan “menyabotase makna” melalui humor, ironi, dan parodi. Dampaknya dapat dilihat pada partisipasi audiens. Tingginya komentar, like, dan repost memperlihatkan bahwa publik tidak sekadar mengonsumsi konten, melainkan turut melanjutkan troll dengan plesetan baru di ruang komentar. Phillips & Milner (2017) menekankan bahwa trolling bersifat partisipatif, hanya “berfungsi” ketika audiens ikut terlibat dalam permainan makna. Artinya, akun Kementerian Kegelapan telah menjadi arena diskursif yang membentuk komunitas politik digital dengan cara kolaboratif. Fenomena ini menegaskan kesimpulan Hariman (2008) bahwa parodi politik memiliki peran krusial dalam menjaga pluralitas wacana demokratis. Dalam konteks Indonesia, akun Kementerian Kegelapan berhasil membuka ruang alternatif di mana publik dapat menertawakan sekaligus mengkritik elite politik, tanpa harus berhadapan langsung dengan risiko represi. Secara keseluruhan, teori trolling dari Phillips & Milner membantu memahami bahwa troll dalam akun Kementerian Kegelapan merupakan praktik ambivalen: resistensi terhadap otoritas sekaligus produksi wacana baru melalui humor digital. Dengan kata lain, humor dan troll di sini bukan sekadar hiburan, melainkan instrumen komunikasi politik yang memperlihatkan bagaimana masyarakat mengkritik, menertawakan, dan menegosiasikan realitas politik kontemporer.

5. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa akun Instagram @kementeriankegelapan merepresentasikan bentuk baru komunikasi politik digital di Indonesia yang memanfaatkan humor dan troll sebagai strategi simbolik untuk menyampaikan kritik sosial dan politik. Melalui pendekatan teori trolling dari Phillips dan Milner, humor dalam akun ini terbukti bersifat ambivalen: di satu sisi berfungsi sebagai ekspresi resistensi terhadap otoritas dan wacana dominan, di sisi lain juga menjadi alat dominasi simbolik yang membentuk gaya komunikasi politik baru di ruang digital.

Praktik humor dan troll dalam akun ini memperlihatkan bagaimana masyarakat memproduksi ulang simbol-simbol politik melalui ironi, absurditas, dan parodi birokratis. Bentuk ekspresi tersebut bukan hanya hiburan, melainkan strategi komunikasi yang membuka ruang partisipasi politik nonformal di kalangan generasi muda. Melalui interaksi audiens yang aktif dalam komentar dan repost, akun ini berperan sebagai arena diskursif yang memfasilitasi pembentukan komunitas politik digital yang kritis dan reflektif.

Dengan demikian, studi ini menegaskan bahwa humor dan troll dapat dipahami sebagai alat pembentukan narasi politik alternatif di media sosial Indonesia. Fenomena ini menunjukkan bahwa partisipasi politik tidak selalu hadir dalam bentuk konvensional, tetapi juga melalui praktik budaya populer yang kreatif dan partisipatif. Ke depan, penelitian lebih lanjut dapat memperluas kajian ini dengan meneliti bagaimana humor digital semacam ini memengaruhi persepsi publik terhadap legitimasi kekuasaan dan dinamika demokrasi di ruang digital.

Daftar Pustaka

- Diaz-Garcia, J.A. (2023). All Trolls Have One Mission: An Entropy Analysis of Political Misinformation Spreaders. *Lecture Notes in Computer Science Including Subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics*, 14113, 159-167, ISSN 0302-9743, https://doi.org/10.1007/978-3-031-42935-4_13
- Goswami, M.P. (2025). Political Narratives On Social Media During Elections: A Systematic Literature Review. *Journal of Content Community and Communication*, 23, 181-199, ISSN 2395-7514, <https://doi.org/10.31620/JCCC.12.25/15>
- Guha, P. (2022). From #Sexual Assault to #Political Campaign Issue: Understanding Sexual Assault Narratives on Social Media Platforms During Political Campaigns in India. *Women S Studies in Communication*, 45(4), 497-512, ISSN 0749-1409, <https://doi.org/10.1080/07491409.2022.2136899>
- Hariman, R. (2008). Political parody and public culture. *Quarterly Journal of Speech*, 94(3), 247–272. <https://doi.org/10.1080/00335630802210369>
- Hasfi, N. (2019). Komunikasi politik di era digital. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 10(1), 93–111. Retrieved from <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/politika/article/view/17500>
- Kumar, J. (2026). Gauging Public Sentiment and Narrative Based on YouTube Comments for Prominent Indian Political Alliances in 2024 General Election. *Lecture Notes in Networks and Systems*, 1478, 121-132, ISSN 2367-3370, https://doi.org/10.1007/978-981-95-1320-8_11
- Martin, Z. (2024). Embodied Political Influencers: How U.S. Anti-Abortion Actors Co-Opt Narratives of Marginalization. *Social Media and Society*, 10(2), ISSN 2056-3051, <https://doi.org/10.1177/20563051241245401>
- Muntaha, M., & Arianto, P. (2024). Political satire on social media responding to the Constitutional Court's decision on vice president age eligibility for the 2024 elections. *Nivedana: Jurnal Komunikasi dan Bahasa*, 5(2), 128–143.
- Munzir, A. A., Asmawi, & Zetra, A. (2019). Beragam peran media sosial dalam dunia politik di Indonesia. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*, 7(2), 173–182. <https://doi.org/10.31289/jppuma.v7i2.2691>

- Nisbett, G. (2021). Reputation matters: parasocial attachment, narrative engagement, and the 2018 Taylor Swift political endorsement. *Atlantic Journal of Communication*, 29(1), 26-38, ISSN 1545-6870, <https://doi.org/10.1080/15456870.2019.1704758>
- Otero, T. Piñeiro (2024). Do Trolls Dream of Women in Power? An Approach to Gender Trolling as Political Violence. *Anuario Electronico De Estudios En Comunicacion Social Disertaciones*, 17(2), ISSN 1856-9536, <https://doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/disertaciones/a.13988>
- Pentzold, C., Zuber, C., Osterloh, J., & Fechner, J. (2022). How to make sense of nonsense: Political absurdity and parodic memes in the #Sharpiegate affair. *International Journal of Communication*, 16, 1053–1074.
- Phillips, W., & Milner, R. M. (2017). *The ambivalent internet: Mischief, oddity, and antagonism online*. Cambridge, UK: Polity Press.
- Rodina, E. (2019). Dictator's Instagram: personal and political narratives in a Chechen leader's social network. *Caucasus Survey*, 7(2), 95-109, ISSN 2376-1202, <https://doi.org/10.1080/23761199.2019.1567145>
- Rodriguez-Saavedra, M.O. (2026). From Getting Out To Vote: Digital Political Narratives and their Effect on Young People's Electoral Decision-making. *Visual Review International Visual Culture Review Revista Internacional De Cultura*, 18(1), 241-260, ISSN 2695-9631, <https://doi.org/10.62161/revvisual.v18.6033>
- Sarasqueta, G. (2025). The construction of political narratives in South American electoral campaigns: a social media analysis. *Revista Latina De Comunicacion Social*, 2025(83), ISSN 1138-5820, <https://doi.org/10.4185/rlcs-2025-2442>
- Sujoko, A. (2020). Satirical political communication in the 2019 Indonesia's presidential election on social media. *Jurnal Informasi*, 49(2), 173–183. Retrieved from <https://journal.uny.ac.id/index.php/informasi/article/view/30174>
- TERÁN♦, L. (2023). Russian Troll Social Media Attacks on Presidential Candidates during the 2016 U.S. Election: The Role of Frontrunner Status, Political Party, and Candidate Gender. *International Journal of Communication*, 17, 6269-6290, ISSN 1932-8036, <https://www.scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOxMe3b&scp=85183673441&origin=inward>
- Vega, O.M. (2023). Young people and Instagram: political narratives beyond transgression in Peru. *Autoctonia*, 7(1), 243-286, ISSN 0719-8213, <https://doi.org/10.23854/autoc.v7i1.288>
- Yan, K. (2023). Russian Troll Vaccine Misinformation Dissemination on Twitter: The Role of Political Partisanship. *Health Communication*, 38(8), 1591-1600, ISSN 1041-0236, <https://doi.org/10.1080/10410236.2021.2021692>